

ANIES VS JOKOWI JURUS PERMAINAN EMOSI MASSA

RMOL

RED MAGAZINE ON LIGHT

Sri Mulyani
Menteri Terbaik
Hoax Yang Menipu

**MAU APA
SBY**

#007/MARET/2018



9 772561 234772

Rp 50.000

KEPALA TETO JOHN C. CHEN
TAIWAN TIDAK PERNAH
BUJASAI KOMUNIS CHINA



DESAIN COVER RMOL ARTISTIK

PENASEHAT:

Teguh Santosa, Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Dar Edi Yoga

PEMIMPIN REDAKSI:

Yayan Sopyani Al Hadi

REDAKTUR EKSEKUTIF:

Jayanto Arus Adi

EDITOR:

Dede Zaki Mubarak, Maruf Alkarkhi,
E Setiawan, A. Fiqi, Melati

REPORTER:

Bunaiya Fauzi, Kiflan Ang,
Ade Mulyana, Boyke HTP (DKI Jakarta),
Tuahta Arief Tarigan (Sumut), Adian
Ardiansyah Hidayat (Sumsel), Ruslan
Tambak (Sumbar), Hendri Ayak (Babel),
Rian Nopandra (Banten), Didi R.
Ridjadi (Jabar), Novian Yoga Khiswara
(Jatim), Wahyu Sabda Kuncahyo
(Kalbar)

SENIOR DESAIN EDITOR:

Achilles

DESAINER GRAFIS:

Jendra Wisrawa

**KETUA BIDANG KERJASAMA &
PUBLIKASI:** S Hadi Setyo MANAJER
PENGEMBANGAN BISNIS: Zulfahmi
Jamba MANAJER Riset &
PENGEMBANGAN: Gunawan Effendi

MARKETING:

Elitha Tarigan, Isrok Nuno Maniche

KEUANGAN:

Fitriyani

SEKRETARIS REDAKSI:

Celia Gustika

DISTRIBUSI:

Firman Wiharyanto

ALAMAT REDAKSI & USAHA:

Jalan Raya Kalibata No 8,
Jakarta Selatan, 12750
Telepon : (021) 791 96781
Fax : (021) 791 96786
Email : majalahrmol@gmail.com

PENERBIT:

PT. WAHANA MULTIMEDIA
ISSN 2581-2947

Turun Gunung

PANAS. Demikian prediksi situasi dan kondisi politik di Tanah Air. Di tahun ini, cuaca panas pesta demokrasi sudah mulai mendera. Ada 171 pemilihan kepala daerah, yang dinilai sebagai pemanasan dan bahkan menjadi ukuran dalam menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden di tahun 2019. Maka semua politisi kelas wahid harus turun gunung. Ini semacam pertarungan dan kuda-kuda; kalah cepat sama saja dengan menyiapkan kekalahan.

Tak heran dinamika juga bergerak seakan di luar kendali. Semua bermain. Bukan dua atau tiga pemain, melainkan banyak pemain. Lapangan politik menjadi semakin liar. Dan disinilah politik sebagai seni merebut kekuasaan butuh pembuktian. Tentu bagi mereka yang sudah merasakan asam-garam strategi peperangan, ini mengasyikan. Papan catur menjadi ladang uji nyali dan taktis. Bagi banyak publik, siap-siap menerima banyak kenyataan yang di luar harapan. Terutama bagi mereka yang menganggap politik sebagai lajur hitam-putih ideologis.

Tiba-tiba saja misalnya, PDI Perjuangan mengumumkan Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019. Pengumuman oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Bali ini cukup menghentak banyak kalangan. Apakah memang PDIP Perjuangan serius mengusung kembali Jokowi meski terkesan agak ketinggalan kereta dibanding partai pengusung lainnya. Misalnya Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Hanura. Atau hanya strategi menghadapi medan Pilkada serentak 2018 yang mulai keteteran.

Tiba-tiba juga, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali naik ke panggung utama. Dalam beberapa kesempatan, SBY turun gunung serta mengadakan sejumlah pertemuan. Sementara di momentum lain, SBY mendelegasikan sejumlah hal kepada putera pertamanya, Agus Harimuti Yudhoyono (AHY). AHY pun tampil bak panglima baru Partai Demokrat. Banyak yang percaya, AHY memang pantas melanjutkan sang ayah dalam mewarisi dan menjaga partai berlambang mercy tersebut. AHY, dengan dorongan SBY, diyakini mampu menakhodai Partai Demokrat dan membawa kembali ke puncak piramida kekuasaan.

Kepemimpinan SBY tentu saja masih harus diperhitungkan. Siapapun yang mau memimpin Indonesia harus mempertimbangkan pengaruh SBY yang masih besar. Bahkan SBY, juga Partai Demokrat, masih menjadi partai tengah yang bisa menentukan arah perjalanan politik Republik ini. Dalam hal ini, Demokrat bukan semata kekuatan penyeimbang, namun pemain utama pertarungan. Dan tentu saja, ini sangat tergantung dengan langkah-langkah politik SBY dalam babak-babak selanjutnya yang mungkin banyak kejutan.

Dan karena itu pula, Majalah RMOL edisi Maret 2018 ini mengangkat tema utama terkait dengan langkah politik keluarga SBY: Mau Apa SBY? Bukan saja di 2018, namun juga di 2019. SBY turun gunung kembali.

Selamat membaca!

DAFTAR ISI

RMOL - RED MAGAZINE ON LIGHT • MARET 2018 • KELOMPOK PENERBITAN RAKYAT MERDEKA ONLINE (RMOL.CO)



- 14 **LAPORAN UTAMA**
Mau apa SBY? 'Lebih utama memilih nama baik daripada kekayaan yang berlimpah; [dihormati] lebih baik daripada emas dan perak'.
- 26 **FORTOFOLIO**
Pusdiklat Industri Siapkan SDM Handal untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0
- 38 **CATATAN KHUSUS**
Kawah Candradimuka Diplomat Zaman Now Menjadi diplomat di masa kini tidak mudah. Perkembangan dunia yang semakin terbuka dan tuntutan masyarakat membuat tugas diplomat semakin kompleks. Bagaimana menyiapkan mereka?
- 42 **DIALEKTIKA PARLEMEN**
Ketua DPR Pasang Badan Tak Mau UU MD3 Rampas Kebebasan Pers
- 46 **KOLOM**
Permainan Emosi Massa Anies Vs Jokowi
- 50 **KORPS DIPLOMATIK**
Taiwan Tidak Pernah Dikuasai Komunis China
- 58 **PARLEMEN**
Pemimpin Baru, Harapan Baru DPR
- 6 **JALAN-JALAN**
- 10 **KONTROVERSI**
- 20 **SPIRITUAL POLITIK**
- 62 **OPINI**
- 64 **OTONOMI DAERAH**
- 74 **KULINER**
- 78 **LAPORAN UTAMA**
- 83 **KARTUN POLITIK**
- 88 **INTERNASIONAL**
- 92 **OPINI**
- 94 **RESENSI BUKU**

MEMBACA PELUANG KONTESTASI PILPRES

Suhu politik Indonesia sejak dua tahun terakhir ini terus memanas disebabkan oleh berbagai event dan isu politik, diyakini akan merangkak mencapai titik didihnya pada tahun politik yang bulan-bulan awalnya tengah dijalani oleh segenap komponen bangsa ini.

DUA tahun kurang kontestasi pemilu presiden (Pilpres) yang diramu bersama pemilu gubernur (Pilgub) dan pemilu legislatif (Pileg), baik pada DPR, DPRD dan DPD akan dilaksanakan bersamaan atau pemilu serentak. Bisa dibayangkan betapa tingginya kompleksitas persaingan dengan hiruk pikuk akan mencapai puncaknya. Kita bandingkan misalnya, sekedar Pilpres atau Pilgub DKI saja telah melibatkan emosi dan energi massa sedemikian luas dan mendalamnya, ditambah dengan aktor politik menengah dan atas yang terlibat, maka tidak terhindarkan suhu politik Indonesia akan mencapai titik didihnya pada 2019 mendatang.

Aktor politik, ini yang penting. Mereka dengan “kemasan super canggih” sukses memainkan ritme politik dan mereduksi suara rakyat sebagai “pemilih pasif” dalam pemilu. Mereka mengembangkan nalar Politik Identitas yang dikunyah dengan “renyah” oleh masyarakat. Nalar politik semacam itu selanjutnya berkembang menjadi



Desvian Bandarsyah

Ahli Sejarah Dan Dekan
FKIP-UHAMKA

tinggi dalam suasana rezim otoriter. Sejarah pemilu kita memberikan pengalaman dan pelajaran yang panjang. Pengecualian pada pemilu 1955 yang menjelaskan polarisasi masyarakat (Jawa) ke dalam empat partai besar, PKI, NU, Masyumi, dan PNI. Pada pemilu kedua dan ketiga di era Orde Baru, 1977 dan 1982 sirkulasi suara juga masih dalam pola yang sama dengan partai yang berbeda, PPP, PDI dan Golkar. Pada pemilu selanjutnya peta itu tidak mengalami perubahan sampai berakhirnya rezim Orde Baru.

Pemilu 1977 dan 1982 menggambarkan perlawanan PPP terhadap keamanan Orde Baru yang ditopang dengan kokoh oleh ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar). Pemilu ini menggambarkan kondisi pasang Politik Identitas, meskipun ide ini dalam catatan sejarah tidak berdaya terhadap dominasi

mainstream di sebagian kalangan pemilih dengan cerita suksesnya pada Pilkada DKI Jakarta yang baru usai. Memang tesis ini masih terus mencari pembenaran meskipun perjalanan panjang sejarah pemilu Indonesia tidak bisa menolak realitas Politik Identitas sebagai model dinamika politik pemilu yang senantiasa mewarnainya.

Di masa lalu, Politik Identitas berlangsung dengan dinamika yang

kekuasaan Orde Baru. Namun pada pemilu 1992 dan terutama 1997 ide ini surut, disebabkan meleburnya isu agama dalam partai Islam bersamaan dengan isu populis partai nasionalis PDI dengan tokoh sentralnya Megawati Soekarnoputri. Berkibarlah slogan “Mega-Bintang” sebagai representasi koalisi PDI dan PPP. PPP dan Megawati disatukan oleh realitas yang sulit mereka kalahkan, Orde Baru dan mesin politik Golkar.

Pada pemilu 1999, di awal era reformasi, Politik Identitas menguat kembali dalam Sidang Umum MPR ketika presiden masih dipilih oleh MPR. Penolakan terhadap Megawati yang dilakukan oleh “Poros Tengah” menjadikan Gus Dur terpilih sebagai Presiden. Namun koalisi yang setengah hati menyebabkan Politik Identitas mengalami kemunduran. Dalam Sidang Istimewa MPR, Megawati terpilih menjadi presiden. Aktor dan partai politik kehilangan ritme disebabkan “ide kampanye” mereka mengalami demoralisasi dalam konteks pemilu berikutnya. Demoralisasi itu berlangsung karena penolakan terhadap Megawati dalam Sidang Umum MPR dengan menggunakan ide-ide Politik Identitas diputarbalikan oleh para aktor dalam Sidang Istimewa MPR yang mengesahkan Megawati sebagai Presiden.

Momentum bagi aktor politik kembali menguat dan aktor mengalami pembiakan secara efektif dalam konstalasi politik, meskipun tanpa partai. Fenomena Pilkada DKI menggambarkan bahwa aktor politik semakin meluas pada level menengah tanpa identitas kepartaian. Partai Islam seolah hanya pelengkap dalam Pilkada DKI yang lalu, karena motor dari pasangan Calon Anis Baswedan dan Sandiaga Uno justru lahir dari partai non Islam. Maka Politik Identitas berjalan tanpa peran partai Islam yang signifikan.

Dalam perkembangan situasi politik semacam itu, kita menyokong Pemilu serentak pada 2019. Bagaimana membaca peluang sekaligus tantangan dalam kontestasi pemilu. Nampaknya, Politik Identitas akan terus bermain, mengingat bahwa kontestasi pemilu melibatkan incumbent dengan partai PDIP dan lawannya masih berangkat dari ide-ide yang sama dalam pilpres 2014 yang lalu. Tentu saja secara tradisional masing-masing kepentingan ide memiliki basis konstituen politik

yang layak untuk diperhitungkan sebagai pemenang. Maka Pemilu serentak akan diwarnai secara kental oleh kegenitan dan sensualitas Politik Identitas. Jika kemasannya dapat lebih canggih lagi dari momentum Pilkada DKI, maka ini akan menjadi lawan sangat serius bagi incumbent.

Peta politik itu memberikan gambaran bahwa secara kultural-kompleksitas pemilih kita dapat disederhanakan dengan meminjam konsepsi budaya Islam di kalangan masyarakat Jawa yang oleh Clifford Geertz dipetakan dalam tiga varian besar, yaitu abangan, santri, dan priyayi yang masih relevan untuk melihat peta konstituen dalam pemilu 2019. Perkembangan sosial yang terjadi, juga mendorong masyarakat mengidentifikasi diri dalam kategori-kategori tersebut.

Incumbent dengan mesin politik PDIP tentunya saja masuk ke dalam kategori masyarakat Jawa abangan yang memiliki akar tradisi politik dengan warna partai nasionalis yang kental. Mereka akan memajukan laju pembangunan sebagai alat untuk meraih dukungan suara masyarakat dengan basis abangan yang kuat. Kelompok konstituen santri memang mengalami pergeseran dan tidak sekenyal era 1970-1980an tetapi secara umum polanya masih sama dengan mengedepan calon dan jargon Islam atau sekurangnya kental keislamannya.

Sedangkan kelompok priyayi yang di masa lalu merupakan bagian dari birokrasi kolonial Belanda, cenderung menjadi pemilih yang semakin rasional. Kemapanan aparatur pemerintahan sipil dalam duapuluh tahun terakhir ini menempatkan mereka sebagai pemilih yang cenderung mendukung incumbent. Aparatur pemerintahan sipil mengalami peningkatan kesejahteraan cukup memadai. Maka pilihan mereka kepada incumbent merupakan pilihan rasional didasarkan pada perkembangan situasi terkini, apalagi jika pesaingnya masuk dalam kategori menengah atau biasa saja.

Dengan demikian menantikan pesta demokrasi Indonesia memerlukan kearifan dalam upaya menghubungkan antara realitas politik hari ini dengan masa lalu dan masa depan bangsa. Ini menjadi penting agar ritual demokrasi tetap berada dalam konteks mengembangkan nalar demokrasi yang memberikan nilai positif bagi pembangunan keadaban bangsa. []



KPU Sumut Tersudut



angan Edi Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus mengambil nomor urut di KPU Sumatera Utara, Medan. Foto: Repro

SUMATERA UTARA MENJADI SALAH SATU PROVINSI “TERSIBUK” DI TAHUN 2018 INI. PASALNYA, SUMATERA UTARA MENGGELAR 8 PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN/KOTA DAN PEMILIHAN GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR (PILGUB) SUMUT PADA 27 JUNI 2018 MENDATANG.

Di masa perbaikan tidak ada diberitahukan masalah ini. Perbaikan itu sampai tanggal 20 (Januari), tanggal 19 sudah masuk jawaban dari kepala dinas terkait

SETELAH sebelumnya menghadirkan drama “Panas Sebelum Bertanding”, Pilkada Serentak 2018 di Sumut kembali “panas” di saat dan pasca penetapan calon pada 12 Februari 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Situasi terpanas berlangsung saat pasangan JR Saragih-Ance Selian ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut 2018 oleh KPUD Sumut. Ketetapan tersebut tertuang dalam keputusan KPUD Sumut Nomor 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018.

Dengan ketetapan tersebut, Pilgub Sumut hanya akan diikuti oleh dua pasang calon, yaitu Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (nomor urut 1) dan Djarot Saiful-Sihar Sitorus (nomor urut 2).

JR SARAGIH MELAWAN

Pasangan JR Saragih-Ance Selian yang merupakan jagoan dari Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pilgub Sumut, dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena KPUD Sumut menilai bahwa ijazah SMA JR Saragih tidak terlegalisir.

Ketetapan KPUD Sumut itu akhirnya menuai pertanyaan besar, hingga kepada publik luas.



Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi

Sebab—meski SMA tempat JR Saragih bersekolah saat ini sudah tutup—, JR Saragih dan Partai Demokrat telah mendapatkan keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa ijazahnya telah terlegalisir. Berdasarkan keterangan JR Saragih, surat keterangan tertanggal 19 Januari 2018 tersebut telah diserahkan ke KPUD Sumut di bawah batas tanggal (20 Januari 2018) perbaikan administrasi pasangan bakal calon.

“Yang tanda tangan (keabsahan ijazah) kepala dinas pendidikan langsung. Kita pasti gugat, kita lihat tuhan masih ada di atas manusia,” kata JR Saragih sesaat setelah mendengar ketetapan KPUD Sumut, 12 Februari 2018.

Sambil menitikkan air mata, JR Saragih mengungkapkan bahwa KPUD Sumut tidak pernah



ah menuju kantor KPU Sumatera Utara di Medan. Foto: Repro

memberitahkannya soal masalah fotocopy ijazah yang dinyatakan tidak terlegalisir tersebut. “Di masa perbaikan tidak ada diberitahkannya masalah ini. Perbaikan itu sampai tanggal 20 (Januari), tanggal 19 sudah masuk jawaban dari kepala dinas terkait,” ungkapnya.

KANGKANGI KEPUTUSAN MA

JR Saragih pernah berpangkat sebagai Letnan Dua TNI Angkatan Darat. Sejumlah penugasan di instansi Angkatan Darat pun telah dijalankannya, antara lain menjadi personel elite Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan Komandan Subdenpom Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) Purwakarta, Jawa Barat.

JR Saragih sebelum kontestasi Pilgub Sumut, telah berhasil terpilih menjadi Bupati Simalun-

gun untuk kedua kalinya pada 2015 lalu. Agak serupa dengan masalah yang mendera JR Saragih pada Pilgub Sumut 2018 ini. Pada 2015 lalu, perkara legalisir ijazah JR Saragih digugat oleh kompetitornya di Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Simalungun, Tumpal Siregar dan Irwansyah Damanik.

Namun PTUN dengan nomor Putusan 13/G/PILKADA/2015/PT TUN-MDN memenangkan JR Saragih dan menolak semua permohonan Tumpal Siregar dan Irwansyah Damanik, dan menyatakan bahwa Ijazah JR Saragih sah secara hukum dan sudah dipergunakan pada Pilbup Simalungun 2010 serta memiliki kekuatan hukum tetap.

Setelah kalah di PTUN, Tumpal Siregar dan Irwansyah Damanik melanjutkan perlawanan hingga ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam hal ini kembali menguatkan Putusan PTUN Medan, dengan menyatakan bahwa Ijazah JR Saragih sah secara hukum, dengan Nomor Putusan Mahkamah Agung 608 K/TUN/PILKADA/2015.

Dengan fakta-fakta di atas, publik luas menilai bahwa KPUD Sumut telah “menganggangi” keputusan-keputusan inkrah yang dibuat oleh lebih dari satu institusi kredibel. Dalam kata lain, KPUD Sumut melalui ketetapan Nomor 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018, seolah mengabaikan ketetapan yang telah dibuat oleh TNI AD, KPUD Simalungun, PTUN Medan, dan Mahkamah Agung.

“Apa penjelasan kita kepada publik untuk masalah JR Saragih, yang sebelum jadi bupati 2 periode menjadi perwira tinggi Angkatan Darat. Ketatnya masuk militer bukan memakai blanko kosong, tapi lembar ijazah yang teruji sesuai prosedur yang ada. Apa yang dibuat KPU seolah menganulir semua lembaga yang dilalui oleh JR Saragih itu,” jelas pengamat politik yang juga merupakan akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar saat menjadi pembicara di acara Nongkrong Politik dengan tema “Menguji Objektivitas Komisi Pemilihan Umum Daerah” di Medan, Sabtu, 17 Februari 2018.

Berdasarkan UU, Shohibul Anshor menegaskan

bahwa seharusnya KPUD Sumut hanya perlu membuktikan status kelulusan SMA JR Saragih.

“Sebetulnya yang diperlukan itu JR tamat SD atau tamat SMA. Itu yang dibutuhkan Undang-Undang. Induk dari regulasi itu Undang-Undang, yaitu seseorang yang mau jadi kepala daerah minimal punya ijazah SMA. Mestinya begitu kalau urusannya substantif,” tegasnya.

Hal yang diungkapkan oleh Shohibul Anshor tersebut dikuatkan oleh pengamat politik Universitas Negeri Islam Sumatera Utara (UIN SU) Faisal Riza. Faisal Riza menyebutkan bahwa awal kegaduhan di seputar ijazah JR Saragih disebabkan kesalahan dalam memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat (1) Bagian (c) bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat.

“PKPU ini ditafsirkan oleh KPU secara berbeda. Makanya mereka menekankan ijazah SMA JR Saragih. Padahal, bisa dimaknai sebagai penggunaan ijazah terakhir, seperti S1 dan di atasnya,” ungkap Faisal Riza.

Senada dengan Shohibul Anshor Siregar dan Faisal Riza, mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo berpendapat apa yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara terkait persoalan ijazah JR Saragih itu merupakan kesalahan.

“Di sini sangat penting dalam pendidikan, dimana kata-kata ijazah pendidikan terakhir itu penting. Pasalnya, ijazah terakhir adalah ijazah paling tinggi yang diajukan calon bukan ijazah SMA. Bagi saya, KPU Sumatera Utara telah salah dalam mengambil keputusan,” tegasnya saat menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan JR Saragi di Bawaslu Sumut, Medan, Minggu, 25 Februari 2018.

Pria yang menjabat Ketua Bawaslu RI dari tahun 2008 hingga 2012 ini mengutarakan dengan kata-kata minimal maka yang diperlukan adalah ijazah paling tinggi sementara PKPU 3/2017 ayat 1 huruf p menghilangkan kata-kata penting yakni soal ijazah terakhir.

“Menurut hemat saya, hilangnya kata-kata PKPU telah mengubah makna pasal 45 UU nomor 10 tahun 2016. Terlebih, dari segi hukum PKPU lebih rendah dari Undang-Undang,

aturan di PKPU harus segera diperbaiki. Ini bisa membuat masyarakat jadi ambigu, apalagi jika KPU Sumatera Utara melihat sebatas ijazah SMA dan ini bisa membuat masyarakat beranggapan bahwa menjadi kepala daerah cukup ijazah SMA maka ini sangat berbahaya,” urainya.

“Menurut saya jika menemukan kesulitan ijazah yang dilegalisir, maka KPU Sumatera Utara harus melihat ijazah asli karena itu adalah jawaban paling tepat,” imbuh Bambang Eka.

SIHAR SITORUS IKUT TERDAMPAK

Seorang warga yang mengaku bernama Hamdan Noor Manik, warga Jalan Nusa Indah III, Tanjung Sari, Batang Kuis, Deli Serdang mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara di Jalan H Adam Malik, Medan, Rabu (14/2). Hamdan yang menyebut dirinya seorang warga Kota Medan mengaku keberatan dengan surat keputusan dari KPUD Sumut yang meloloskan Sihar Sitorus sebagai calon wakil gubernur untuk Pilgub Sumut 2018.

Menurut Hamdan Noor Manik surat keterangan pengganti Ijazah yang digunakan oleh Sihar Sitorus untuk mendaftar sebagai calon wakil gubernur terindikasi tidak sesuai aturan yang ada pada Permendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Saya melaporkan KPU Sumut soal penetapan. Persoalannya masalah Permendiknas menyangkut tentang surat keterangan pengganti ijazah salah satu paslon. KPU Sumut apakah dia menggunakan permen itu dalam menentukan atau tidak, sehingga saya datang mengadu meminta agar Bawaslu memerintahkan KPU Sumut untuk meninjau ulang. Sepanjang tidak sesuai undang-undang yang berlaku, itu batal demi hukum. Berarti KPU melampaui kewenangannya,” katanya.

Hamdan menyebutkan dalam pengaduannya tersebut ia menyampaikan 3 alat bukti kepada Bawaslu Sumut yakni Surat Keputusan KPU tentang pengesahan, Fotocopy pengganti ijazah atas nama Sihar Sitorus dan Permendikbud nomor 29



Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus mendatangi kantor KPU Sumatera Utara di Medan. Foto: Repro

tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Saya sudah melampirkan itu. Itu harus ditinjau sesuai tidak dengan peraturan peundang-undangan,” ujarnya.

Bawaslu Sumut sendiri mengatakan akan memproses seluruh pengaduan yang masuk. Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan mereka memiliki 3 hari untuk melakukan penelitian berkas pengaduan. Kemudian 3 hari berikutnya diberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melengkapi berkas gugatan, kemudian masa penyelesaian sengketa selama 12 hari.

“Kita akan menyelesaikan hingga putusan selama 12 hari kalender,” ungkapnya.

DJAROT-SIHAR TERANCAM GAGAL

Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut 2018, Djarot Saiful-Sihar Sitorus terancam gagal ikut Pilgub Sumut 2018. Pasalnya, ada pihak yang mengungkapkan bahwa seharusnya

Sihar Sitorus tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon wakil gubernur.

Ilah Kuasa hukum Hamdan Noor Manik, Kamaluddin Pane, telah membeberkan lima fakta yang membuat berkas calon wakil gubernur Sihar Sitorus seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Sumut. Kamaluddin mengatakan lima fakta tersebut berkaitan dengan ijazah Sihar Sitorus yang disebutnya tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Kita menemukan ada masalah dari ijazah Sihar dan harusnya itu menjadi perhatian dari KPU Sumut,” katanya.

Kamaluddin menjelaskan lima fakta tersebut yakni pertama, saat mendaftar sebagai calon wakil gubernur terindikasi tidak sesuai aturan dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan foto copi ijazah / STTB/SKPI/STTB.

“Termasuk kita temukan juga soal nama yang salah di SKPI terhadap Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, ini yang benar,” ujarnya.

Temuan berikutnya, menyangkut surat kehil-

angan dari polisi yang ternyata baru masuk pada 14 Januari 2018, sedangkan berdasarkan tahapan pendaftaran pasangan calon itu dimulai tanggal 8 dan berakhir tanggal 10 Januari 2018,

Belum lagi, ungkapnya, pada saat mendaftar cawagub ini memakai SKS (surat keterangan sekolah) yang menurutnya saat pendaftaran tidak diperbolehkan menggunakan itu. Selain itu menggunakan kop surat yang berbeda terhadap kop surat keterangan sekolah dengan SKPI, terakhir persoalan sidik jari dan nilai yang tidak dilampirkan saat tu.

Diketahui, saat melaporkannya, Hamdan menyertakan bukti berupa fotokopi Keputusan KPU Sumut No 07/PL.03.3.Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; fotokopi SKPI No 283-U/17-18/SMA PL/2018 tanggal 15 Januari 2018 dari SMA Pangudi Luhur dan fotokopi Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.

Hamdan Noor Manik juga melengkapi berkas pelaporan terkait dugaan pelanggaran Pilgubsu dengan tanda bukti penerimaan laporan 02/LP/PG/prov/02.00/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018.

Hamdan melaporkan KPU Sumut yang telah ceroboh menerima berkas pencalonan dan menetapkan calon Sihar PH Sitorus sebagai calon Wagubsu, yang tidak memiliki ijazah dan menggunakan Surat Keterangan Sekolah saat mendaftar pada 10 Januari lalu.

“Kami minta Bawaslu Sumut segera menindak lanjuti pengaduan kami ini,” ujarnya.

INVISIBLE HAND

Pengamat politik UMSU, Arifin Saleh Siregar menjelaskan bahwa Bawaslu Sumut harus fokus, dan tidak boleh menganggap sepele dua kasus besar tersebut, apalagi coba-coba menjadikan-nya sebagai kepentingan tertentu.

“Lebih bagus putusan untuk dua gugatan ini diambil secepatnya dengan mekanisme persidangan yang cepat dan transparan. Jangan menunggu atau mengulur-ulur hingga di ujung waktu atau di saat-saat akhir. Tak perlu menunggu ‘wangsit’ atau ‘petunjuk’ dari kikanan atau atas bawah. Bawaslu Sumut pasti

sudah tahu apa yang harus dilakukan,” katanya saat diwawancarai.

Dua kasus tersebut juga dinilai Arifin sebagai kasus yang menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, selain menyangkut nasib calon, peluang dan peta pertarungan di Pilgub Sumut juga ikut dipertaruhkan.

“Jadi, integritas dan profesionalitas para komisioner Bawaslu Sumut ditantang dan dipertaruhkan. Tentu, jangan ada istilah aji mumpung sehingga menghalalkan segala cara. Dalam konteks politik lokal, ini tugas besar dan tugas utama Bawaslu. Apalagi ini menyangkut pemilihan gubernur di Sumatera Utara yang memang sudah menjadi wilayah tugasnya Bawaslu Sumut,” jelas Arifin.

Selain itu, lanjut Arifin, dua kasus tersebut dipercaya banyak pihak bukan sekedar persoalan JR Saragih dan Sihar an sich. Dengan kata lain, ada “tangan-tangan yang tak terlihat yang ikut mengintervensi.

“Tangan-tangan itu tidak hanya ada di Sumatera Utara, tapi juga ada dari pusat (Jakarta) sana. Jadi, Bawaslu harus menunjukkan keindependenan dan keberaniannya dengan menepis kuat jika memang tangan-tangan mencoba mengganggu dan menyusupkan kepentingannya. Semua pihak juga harus turut mengawasi kasus ini. Hati-hatilah, jangan sampai invisible hand itu yang justru menguasai persoalan ini dan menitipkan keinginannya melalui keputusan Bawaslu,” tandasnya.

KEPUTUSAN BAWASLU: KPU SUMUT SALAH JALANKAN PROSEDUR

Setelah menjalani musyawarah gugatan di Bawaslu Sumut, akhirnya JR Saragih-Ance kembali memiliki harapan untuk ikut ambil bagian dalam “panasnya” persainagan di Pilgub Sumut 2018.

Pada pembacaan dan penetapan hasil musyawarah gugatan JR Saragih tersebut, Sabtu, 3 Maret 2018, imulai pukul 18.00 WIB, Bawaslu menyatakan bahwa permohonan JR Saragih sebagai pemohon diterima sebagian dan ditolak sebagian.

Permohonan yang diterima adalah mencabut ketetapan KPU Sumut tentang status Tidak Me-



Tim KPU Sumut. Foto: Repro

menuhi Syarat (TMS) JR Saragih-Ance sebagai Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut. Sementara yang ditolak adalah menetapkan langsung JR Saragih-Ance sebagai Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut nomor urut 3.

Agar JR Saragih-Ance benar-benar dapat menjadi pasangan nomor urut 3 di Pilgub Sumut, Bawaslu merekomendasikan pihak JR Saragih untuk mendapatkan legalisir ijazah dari Sukuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta (setingkat kabupaten/kota) dan KPU Sumut untuk melakukan klarifikasi di instansi yang serupa. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 7 hari kerja.

“Hal itu didasarkan pada PKPU 3/ 2017 dan Permendikbud 29/ 2014, dimana disalin juga dalam PKPU 3 Pasal 50 bahwa jika sekolah sudah tutup atau tidak beroperasi lagi maka harus meleges pada tingkat kabupaten kota. Saat pemberkasan kemarin, objek yang dimasukkan kepada KPU Sumut adalah fotokopi yang dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,” jelas Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R. Rasahan usai musyawarah gugatan JR Saragih ditutup.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa KPU Sumut telah menjalani prosedur yang salah dengan meminta berkas legalisir ijazah SMA JR Saragih di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta saat verifikasi administrasi pada awal Februari 2018 lalu.

“Maka dokumennya tidak tepat, klarifikasi yang dilakukan KPU kepada dinas tingkat provinsi juga tidak tepat. Karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang mengesahkan fotokopi legalisir ijazah tersebut,” jelas Syafrida.

Rekomendasi atau keputusan Bawaslu dalam musyawarah gugatan kepada KPU sejatinya bersifat mengikat atau wajib dijalankan. Namun hal tersebut seolah kurang diindahkan oleh Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga. Benget berkilah bahwa dalam fakta persidangan, tidak pernah ada yang menyebutkan tentang meminta dan mengklarifikasi legalisir ijazah SMA JR Saragih ke Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota atau Sukuk Dinas tersebut.

“Tadi kan majelis menyuruh melegalisir kepada instansi pendidikan tingkat kabupaten



Pasangan JR Saragih-Ance Selian melengkapi dokumen pendaftaran di KPU Sumatera Utara, Medan. Foto: Repro

kota. Itu kan tidak pernah muncul dari pemohon dan termohon serta ahli dalam persidangan. Jadi ini semacam kesimpulan sendiri dari majelis sidang. Namun apapun itu, kami akan pelajari dulu salinannya,” ungkap Benget usai mendengar putusan Bawaslu.

Menjawab hal itu, Safrida menegaskan bahwa baik pemohon (JR Saragih) maupun termohon (KPU Sumut) telah memberi kepercayaan kepada Bawaslu untuk memimpin dan membuat putusan musyawarah dengan seadil-adilnya. Oleh karenanya, putusan Bawaslu itu tidak menyalahi prosedur apapun.

“Meskipun pada pokok permohonan maupun jawaban termohon tidak disebutkan hal itu, kan pemohon dan termohon sudah mempercayakan kepada Bawaslu untuk memutuskan dengan seadil-adilnya. Karena pada prinsipnya dalam permohonan, Pak JR ingin langsung ditetapkan. Tapi karena ada ketidaksesuaian prosedur, maka harus menjalankan prosuder yang benar,” tandas Syafrida.

BAKAL CALON INDEPENDEN SENGAJA DIJEGAL?

Setelah persoalan ijazah JR Saragih dan Sihar Sitorus, persoalan “panas” selanjutnya yang mewarnai perhelatan Pilkada Serentak 2018 di Sumut adalah gugurnya seluruh bakal calon dari jalur independen atau perseorangan.

Dua (2) Bakal pasangan calon dari jalur independen di Deliserdang, dan lima (5) bakal pasangan calon di Kabupaten Langkat harus menerima kenyataan pahit setelah KPUD setempat menetapkan seluruhnya tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon kepala daerah.

Tidak tinggal diam, para bakal pasangan calon tersebut pun melakukan perlawanan dan melayangkan gugatan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat. Perlawanan paling hangat, dimunculkan oleh pasangan Sofyan Nasution-Jamilah (Deliserdang), dan Djohar Arifin-Iskandar Sugito.

Dalam kasus Sofyan Nasution-Jamilah, Ketua Tim Kuasa Hukum Mulyadi mengungkapkan bahwa KPU Deliserdang telah dua kali melakukan kesalahan yang sama dalam memproses berkas pendaftaran untuk maju di Pilkada Deli Serdang.

Kesalahan pertama, menurut Mulyadi, KPU Deliserdang tidak menunjukkan kinerja yang profesional dalam melakukan perhitungan berkas dukungan pasangan Sofyan-Jamilah pada saat proses pendaftaran calon dari jalur independen. Dalam kasus ini, pasangan Sofyan-Jamilah telah menyerahkan 195 ribu dukungan dalam bentuk fotocopy kartu identitas, namun KPU menyatakan yang lolos hanya 110 ribu.

“Anehnya setelah kami gugat, mereka minta damai dan akhirnya disepakati hitung ulang dan hasilnya terbukti 188 ribu berkas dukungan tersebut clear,” katanya, Rabu, 21 Februari.

Hasil ini sendiri ternyata tidak langsung membuat pasangan Sofyan-Jamilah langsung mulus ditetapkan sebagai pasangan calon. Menurut Mulyadi, KPU Deliserdang kembali berulah saat proses memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dimana KPU Deliserdang kemudian tiba-tiba menyatakan berkas dukungan yang memenuhi syarat hanya 69 ribu.

Angka ini kembali mereka gugat ke Panwaslih dan hasilnya dinyatakan bahwa jumlah dukungan terhadap pasangan ini untuk maju dari kalangan independen sudah mencukupi yakni 102 ribu yang sudah clear setelah yang ganda dibersihkan semuanya.

“Kami melihat KPU tidak profesional karena berulang-ulang tidak memberkan kepastian hukum, berulang-ulang tidak memberikan keadilan, ada kecenderungan seperti itu. Makanya kami menolak kalau ada verifikasi lanjutan. Kita akan mengambil langkah hukum lanjutan terhadap mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Panwaslih Deliserdang dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2018 yang dilaksanakan pada Selasa (20/2) memutuskan bahwa jumlah dukungan terhadap paslon Sofyan-Jamilah berdasarkan hasil Penelitian Administrasi (Litmin) verifikasi ulang yaitu sebanyak 102.354 dukungan bukan berdasarkan data di Silon yang hanya 62.300 dukungan.

Meski menyebutkan jumlah dukungan memenuhi syarat, Panwaslih belum memutuskan merekomendasikan agar pasangan ini langsung ditetapkan sebagai calon di Pilkada Deli Serdang 2018.

“Kita hargai keputusan Panwaslih karena didalamnya masih ada secercah harapan bagi pasangan Sofyan-Jamilah untuk dapat lolos,” pungkas Mulyadi.

Sofyan sendiri, meyakini bahwa dirinya dan Jamilah dapat memberi harapan bagi masyarakat Deliserdang dalam menggunakan hak demokrasinya.

“Pastinya harapan kita semua, Pilkada Deliserdang tidak melawan kotak kosong. Kita yakin lolos menjadi calon. Masyarakat Deliserdang butuh pilihan dalam pesta demokrasi ini. Bukan demokrasi namanya jika masyarakat tidak punya pilihan,” ungkap Sofyan.

Sementara dalam kasus Pilkada Kabupaten Langkat, Djohar Arifin menilai, ada indikasi bahwa dirinya sengaja dijegal untuk menjadi calon bupati.

“Kami tempuh semua melalui jalur hukum yang ada pada pilkada. Kami ingin semua berjalan soft walau dada ini sesak panas karena adanya pelanggaran PKPU terhadap kami, dan kami tidak ingin suasana jadi riuh walaupun sebagian besar pendukung minta dimobilisasi untuk adakan aksi terhadap situasi ini,” beber Djohar Arifin yang pernah menjadi Ketua Umum PSSI itu.

Djohar Arifin mengungkapkan keberatannya atas prosedur yang dijalankan oleh KPU Langkat saat melakukan verifikasi faktual bakal calon perseorangan.

“Banyak pendukung yang takut disuruh datang saat verifikasi faktual. Mereka takut ketahuan kepala desa kalau mendukung kami,” katanya.

Oleh karena itu, Djohar Arifin berharap, verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan dilakukan secara rahasia.

“Kita berharap verifikasi faktual yang dilakukan itu berjalan secara rahasia. Para pendukung perlu dijamin keamanan dan keselamatannya,” harap Djohar. □ FAJAR SIDDIK



SANG PISANG

Menembus Kota Kembang



Kaesang Pangarep saat meresmikan gerai ke-6 Sang Pisang di Kota Bandung. Foto: Repro

SUASANA MERIAH TERLIHAT DI KAWASAN MALL BRAGA CITYWALK JALAN BRAGA BANDUNG, MINGGU(18/2). TAK HANYA PENGUNJUNG MALL, PULUHAN PENGEMUDI OJEK ONLINE JUGA TAMPAK MENGANTRE DI GERAI YANG MENJUAL KULINER BERBAHAN DASAR PISANG ITU.

MALAM itu, bungsu Presiden RI, Joko Widodo, Kaesang Pangarep membuka gerai ke-6 'Sang Pisang' jajanan nugget pisang di Kota Bandung. Sebelumnya Kaesang sukses membuka lima gerai yang berada di Jakarta dan Kota Makasar.

Kaesang, datang langsung dari Jakarta pada pembukaan gerai perdananya di Kota Bandung. Dengan mengenakan kaos berwarna biru, Kaesang tak segan-segan melayani pembeli yang menyerbu gerai 'Sang Pisang'. Ia memang bermaksud membuka gerai 'Sang Pisang' di seluruh Indonesia.

"Ini gerai keenam, empat di Jakarta dan satunya di Makasar, untuk di Bandung, rencananya akan dibuka lagi sekitar tiga sampai lima gerai," kata Kaesang Pangarep kepada awak media.

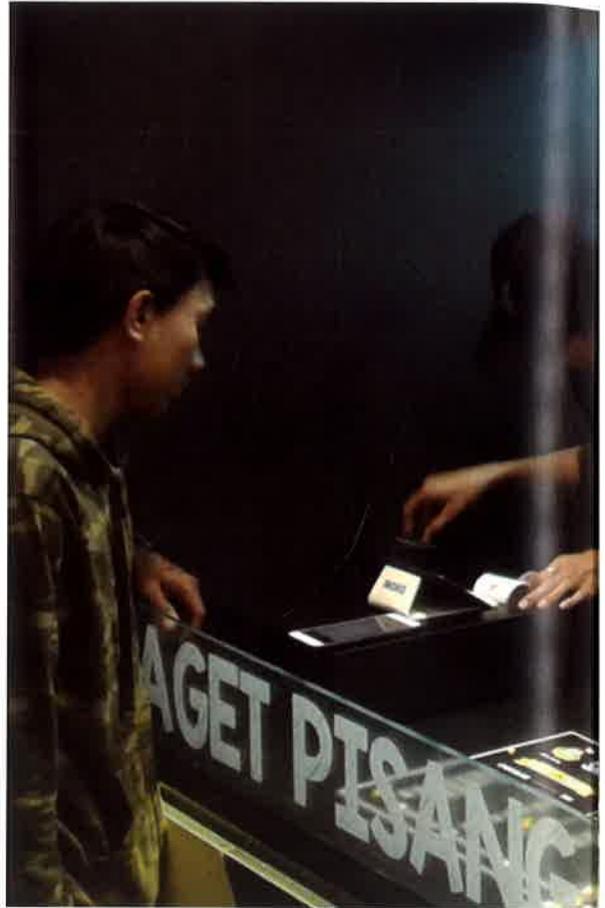
Untuk varian kuliner dengan tagline 'nugget pisang kesayangan' ini juga tak berbeda dengan di gerai lain yang sudah dibuka seperti ITC Cempaka Mas, ITC Mega Kuningan, ITC Mangga Dua, Pusat Grosir Cililitan dan Makasar.

Menu sang pisang dihadirkan dengan varian rasa coklat, green tea, vanilla, tiramisu, strawberry, blueberry dan avocado. Dengan harga per kotak Rp 20.000. Semua menu Sang Pisang di setiap kota sama, hanya setiap tempat punya favorit rasa yang berbeda-beda, seperti pelanggan di Jakarta tidak suka rasa Blueberry. Tetapi di Makassar rasa Blueberry paling favorit.

Warga Bandung cukup besar. Kendati demikian, Kaesang paham bisnis yang dirintisnya di Bandung seperti juga di Jakarta ini akan mendapat persaingan ketat. Menurut dia, kota Bandung memang dikenal sebagai gudang kuliner, sehingga ia perlu menerapkan strategi khusus.

"Kalau di Makasar kan persaingan usaha belum terlalu ketat. Tapi saya optimis menjalankan Sang Pisang, karena saya melihat banyak kesempatan, dan saya senang dapat membantu banyak orang," tegasnya.

Menurut Kaesang, tujuan utamanya membuka Sang Pisang di daerah adalah untuk memajukan makanan lokal. Menurut dia, Sang Pisang merupakan bisnis terbarunya yang keempat selain bisnis pakaian. Ia bertekad, dengan bisnis ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan



mengurangi pengangguran. Sang Pisang sendiri pekerjanya sudah mencapai ratusan. Selain itu, dengan berbisnis sendiri ia bisa membayar uang kuliah sampai lulus. "Karena bapak saya tidak membiayai kuliah saya," tutur dia.

Ia menegaskan, meski di Bandung atau Jakarta bukan daerah bukan penghasil pisang, namun ia tetap percaya diri membuka usaha nugget pisang ini. Bahan utama nugget pisang, khusus didatangkan dari Lampung karena harganya lebih miring.

"Biasanya untuk gerai di Jakarta bisa menghabiskan pisang sebanyak satu ton," kata dia.

Kaesang kuliner Sang Pisang ini dibuka ketika ia pulang ke Indonesia di sela-sela kesibukannya kuliah di Singapura.

"Sang Pisang sendiri telah ada sejak Novem-



Kaesang di gerai Sang Pisang . Foto: RMOL

ber 2017 tepatnya di ITC Cempaka Mas Jakarta. Tapi teman-teman kuliah saya di Singapura belum mencoba Sang Pisang,”ujarnya,

Menurut dia, dalam waktu dekat, Sang Pisang akan go international. Ia menambahkan sudah ada yang menawarkan untuk masuk ke negara Singapura, Malaysia, dan Filipina

“Namun karena Sang Pisang baru buka dua bulan dan masih ada kesulitan ijin usaha, maka Sang Pisang fokus dulu di Indonesia,” ungkapnya.

Mengenai resep Sang Pisang, Kaesang mengakui resep nugget pisang bukan hasil ciptaannya melainkan dari partner kerjanya.

“Ke depan saya akan ada usaha lain, dan saya sudah dapat resep untuk membuka sebuah usaha baru, mungkin dua bulan lagi akan saya buka usaha tersebut,” ujarnya.

Kaesang mengakui, untuk mendongkrak usaha nugget kulinernya ia berkolaborasi dengan kakaknya, Gibran. Namun menurutnya, hal tersebut hanya sebatas sharing usaha.

“Tidak ada bantuan sama sekali dari kakak saya Gibran, namun ada kolaborasi antara usaha Markobar milik Gibran dengan Sang Pisang, yaitu sharing. Dapat dilihat logo Sang Pisang merupakan maskot Markobar,” ujarnya.

Untuk pengantaran, kata Kaesang, Sang Pisang sudah bekerjasama dengan Grab, dan untuk pembayaran bekerjasama dengan PayTren. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan jajanan ini, Sang Pisang telah bekerjasama dengan aplikasi online, baik Grab dan Gojek. Bagi konsumen yang ingin membeli dapat langsung melakukan pemesanan melalui aplikasi Grab. □ LANI SAFITRI



Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Sekjen Hinca Pandjaitan (kiri) Foto: Repro

SBY Reborn

THIS IS MY WAR. KATA KATA ITU KELUAR DARI MULUT SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, TOKOH YANG AKRAB DIPANGGIL SBY.

Andai ucapan itu bukan datang dari mantan Kasospol ABRI di era Soeharto mungkin biasa biasa saja. Namun menjadi lain karena kini SBY adalah begawan politik Indonesia. Setiap langkah politik putra asal Pacitan dan menantu Sarwo Edy Wibowo ini selalu mencuatkan polemik di tengah publik.

Kita tengok ihwal meroketnya nama SBY di pusaran politik kala itu, ketika dia memutuskan lengser dari posisi Menkopolkam di era Megawati. Sebagai mantan Kasospol SBY tentu memiliki kalkulasi politik yang piawai. Sekali lagi ini adalah sebuah strategi penuh kalkulasi, jauh dari spekulasi. Artinya terukur secara obyektif langkah langkah yang ditempuhnya.

Namun niatan itu terbaca. Syahwat politik SBY terendus Megawati. Bahkan Mega pn akhirnya mencopotnya dari posisi Menkopolkam. Memang bagi peraih Adi Makayasa ini sekoci untuk menopang langkah politiknya telah disiapkan.

Pengalaman buruk yang dialami ketika kalah dalam voting untuk menjadi RI dua ketika itu benar-benar menjadi lecutan bagi SBY. Partai Demokrat strategi berkontestasi dalam laga lanjutan berikutnya.

Adalah Vence Rumangkang, yang kemudian ditopang tim 9 meski jumlah personelnya ada 10 orang, yakni (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS menjadi motor penggerak partai berlambang berlian

segi lima ini.

Tak butuh waktu lama bagi SBY mewujudkan asanya menjadi RI satu. Pilpres 2004 adalah momentum bagi SBY, dan yang menjadi korban salah satu penyokong utama bagi pria terlahir 9 September 1949 ini, yakni Megawati Soekarnoputeri. SBY berduet dengan Jusuf Kalla yang punya pengaruh di Indonesia Timur. Megawati yang kala itu didampingi Prabowo Subianto tak banyak berkutik menghadapi determinasi SBY-JK yang cukup tangkas dengan jurus jurus pamungkasnya.

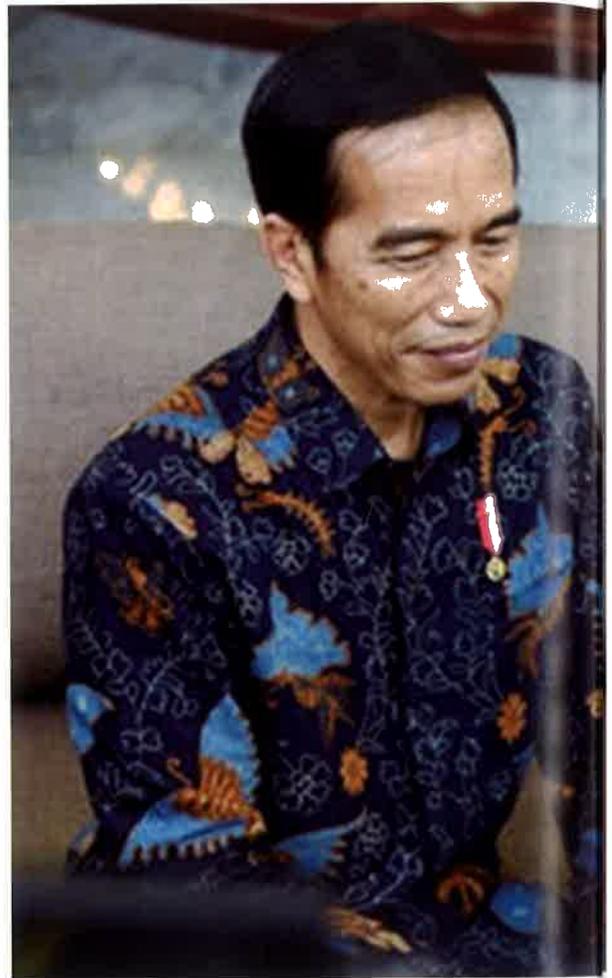
Indonesia dengan era SBY-JK di periode pertama, kemudian dilanjut dengan SBY - Budiono menandai babak baru politik yang mengandalkan kekuatan strategi. PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu terpuruk menghadapi laga Pilpres yang tidak lagi berbasik pada fanatisme dan loyalitas belaka. Strategi tempur dan perencanaan yang nyaris sempurna terbukti lebih unggul dibanding sandaran loyalitas semata.

Realitas ini yang kemudian menyadarkan partai-partai politik mulai memodernisir diri. Tak lama setelah itu Prabowo turun gelanggang membesut Partai Gerindra, Wiranto membidani Hanura, belakangan menyusul Surya Paloh dengan Nasdemnya. Ini artinya apa? Pesan yang perlu diterjemahkan adalah demokrasi membuka ruang bagi siapa pun untuk andil di dalamnya. Tanpa Demokrat SBY tidak akan mungkin menjadi presiden republik ini.

Begitu pun dengan Joko Widodo, apakah mungkin mantan pengusaha mebel asal Solo ini dapat menduduki RI satu, tanpa mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan. Memang Joko Widodo ada beberapa perkecualian, pasalnya secara genetik Joko Widodo bukanlah bagian langsung dari dinasti Soekarno. Namun sosok Jokowi mampu meruntuhkan syahwat politik sang patron, yakni Megawati tidak lagi menggunakan hak prerogatifnya untuk maju menjadi capres.

SBY REBORN

Strategi SBY dengan Partai Demokratnya adalah pelajaran berharga bagi demokrasi di negeri ini. Ada dua pesan yang perlu dicermati di balik fenomena ini. Pertama, demokrasi bagaimana



Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat bert...

pun adalah pertempuran akal sehat. Loyalitas dan dukungan fanatik tidak cukup menjadi bekal menghadapi kompetisi yang semakin global. Jika pada Pilpres 2014 lalu Mega maju sendiri sebagai calon presiden, tidak 'menugaskan' Joko Widodo bisa jadi hasilnya akan berbeda.

Ini artinya, Megawati sebagai patron di partai berlambang moncong putih untuk mengedepankan akal sehat. Meski tidak menjadi presiden, tokh Megawati memiliki pengaruh luar biasa bagi perjalanan politik negeri ini. Apalagi Jokowi sebagai wong Jowo tahu betul bagaimana mikul duwur mendhem jero, dan juga falsafah ing ngasro sung tulodho, ing madyo mangun



Presiden Joko Widodo di Istana. Foto: Repro

karso, tutwuri handayani,

Mega merasa nyaman dengan penugasan yang diberikan kepada Joko Widodo. Terbukti pada Rakernas lalu di Bali PDI Perjuangan telah resmi mengusung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024. Langkah Mega dan juga sikap PDI Perjuangan adalah manifestasi nyata mereka belajar dari kesalahan masa lalu. Bagaimana pun kuatnya kharisma Megawati, namun menghadapi hajatan Pilpres sadaran loyalitas dan fanatisme saja tidak cukup menjadi jurus pamungkas.

Kedua, publik perlu mafhum dan cermat mendalami manuver manuver politik SBY.

Diterjunksn Agus Harimurti pada Pilgub DKI lalu sesungguhnya adalah sasaran antara.. Langkah itu merupakan investasi awal SBY dan Partai Demokrat untuk mengarungi perjalanan politik lebih lanjut. Ada kalkulasi panjang, mengapa SBY mengambil keputusan itu. Tidak mungkin AHY, begitu putra sulung pasangan SBY-Ani Yudhoyono akrab di sapa ini dikorbankan begitu saja dari karier militernya.

Dalam strategi perang ada front-front yang sengaja dilepas untuk memenangkan keseluruhan perang itu sendiri. Tampaknya mantan Kasospol era Soeharto ini sedang memainkan

strategi ini. Dia tahu persis perang adalah menentukan goal dan sasaran. Sasaran tidak boleh berubah. Menyerang terus menerus, tidak boleh berhenti. Ketika ada serangan atur strategi, tunggu kesempatan menyerang balik. Kenali dirimu, kenali musuhmu, seribu kali perang seribu kali menang.

Nah, realitas inilah yang perlu menjadi renungan publik. Kompetisi parpol telah menjadi laga perang dalam tanda kutip para jenderal. Demokrat dengan SBY, Gerindra dengan Prabowo, Nasdem dengan IGK Manila, PDI Perjuangan ada Theo Syafi'i, Hanura ada Wiranto, PKPI ada Sutiyoso, bahkan partai baru, seperti Berkarya meski yang menjadi Ketua Neneng A Tutuy, tetapi beberapa jenderal dan loyalis Soeharto ada juga di dalamnya.

Ini artinya kompetisi politik telah menjadi laga yang menakutkan. Betapa tidak, kehadiran sejumlah tokoh yang berlatar belakang militer akan mendorong adu strategi tak ubahnya perang. Permainan intelijen tidak bisa dilakukan. Ingat juga perang adalah *kill or to be killed*.

Tentu tidak seteknis itu, namun militer bagaimana meniscayakan demokrasi. Dengan begitu kehadiran militer yang belakangan menjadi trend di jagad politik Indonesia adalah kecenderungan yang patut diwaspadai.

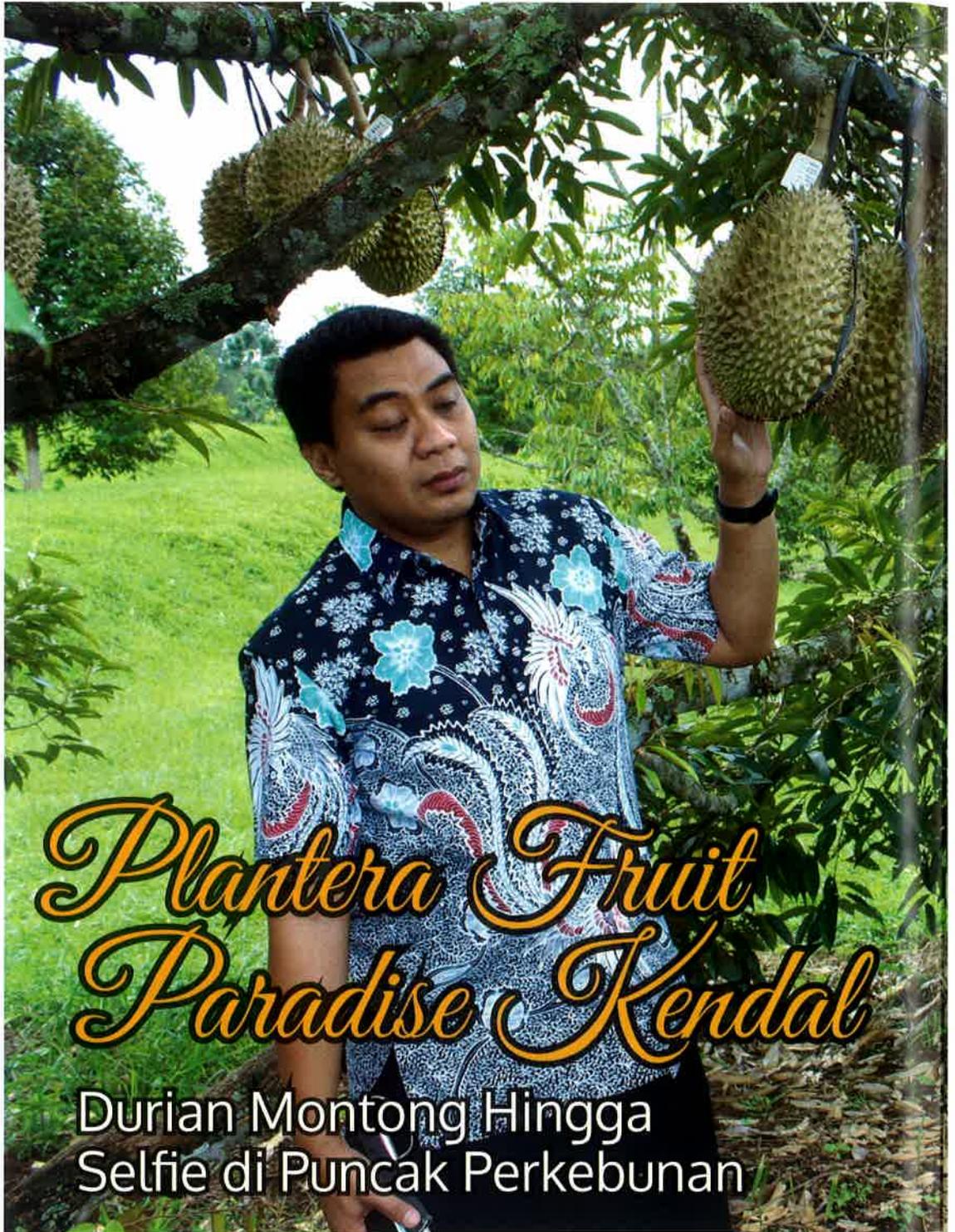
Sebagai politikus yang matang di dunia militer SBY adalah jago strategi. AHY sang putra bukan dikorbankan, namun sesungguhnya itulah cara SBY menempa untuk mengorbitkannya di episentrum politik Indonesia. Bagi AHY sendiri bekal yang dimiliki lebih dari cukup.

Kekuatan kapital sebagai putra mantan presiden dua periode tak perlu diragukan. Begitu pun networking yang dimiliki secara nasional, dan internasional boleh jadi SBY lah yang nomor wahit. Dan jangan lupa secara intelektual menantu Sarwo Edhi Wibowo ini memiliki kecerdasan di atas rata rata. Sejarah telah membuktikan untuk ini, apalagi daerah biru putra mantan Pangkostrad yang diwarisi melalui istrinya Ani Yudhoyono adalah kekuatan spiritual yang bagi masyarakat timur sangat memberikan pengaruh. □ JAYANTO ARUS ADI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye 2014 di Karawang. Foto: Repro







Plantera Fruit Paradise Kendal

Durian Montong Hingga
Selfie di Puncak Perkebunan



Foto: Dokumen Pribadi

“Enakan durian montong Plantera Kendal daripada durian montong Thailand di pasaran. Rasanya lebih manis, legit dan ada pahit-pahitnya dikit khas Indonesia,” kata pemilik Agrowisata Plantera Fruit Paradise di desa Sidokumpul, kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Budi Darmawan belum lama ini.

Penasaran, RMOLMagazine pun mencoba mencicipi durian montong khas Plantera. Aroma manis khas durian langsung menyeruak begitu sebiji durian dibelah. Tampilan dagingnya kuning dan tebal. Saat coba menggigit, ternyata benar. Rasa duriannya persis yang dipromosikan.

Meski begitu, ada yang kurang dalam promosi Budi Darmawan. Yaitu, bijinya kecil. Jadi, siapapun yang menikmati Durian Montong khas Plantera dijamin puas.

Tak hanya durian montong, Plantera juga mengembangkan kelengkeng Kinglong. Budi mengklaim, kelengkeng itu yang terbaik di dunia dan asli Indonesia. Saat coba merasakan, hmmm, tak diragukan.

Agrowisata Plantera Fruit Paradise terletak di daerah pegunungan selatan Jawa Tengah. Berdiri di atas lahan 234 hektar, pihaknya sukses mengembangkan Durian Montong khas Indonesia, Kelengkeng Kinglong asli Indonesia hingga Srikaya Grand Anona.

Sejauh ini, Plantera sudah menanam 10.000 pohon durian, 10.000 pohon kelengkeng, 13.000 pohon buah jeruk, 4.000an rambutan, dan ribuan pohon buah lainnya. Keunggulannya adalah, seluruh buah merupakan hasil pengembangan timnya secara mandiri.

“Untuk pertanian itu butuh teknologi, itulah yang kami kembangkan. Petani itu kalau bersaing tidak cukup hanya mengembangkan buah terbaik di Indonesia, tapi terbaik di dunia,” kata pendiri Yayasan Obor Tani itu.

Pengembangan plantera sejak 2000. Ketika itu, Budi berpikir keras mengembangkan bidang hortikultura. Akhirnya, ia memilih mengembangkan perkebunan buah unggulan. Pada 2005, ia mulai mewujudkan cita-citanya hingga membuka Agrowisata Plantera.

Saat ini, pihaknya sudah . Hasil kebunnya sudah masuk ke Pasar Swalayan semisal Giant,



Carrefour dan beberapa pasar swalayan lainnya.

Budi mengungkapkan, durian hasil pengembangannya diakui dunia. Bahkan, ahli Durian dari Thailand pun mengakui Durian Montong yang dikembangkannya. Bahkan, kelengkeng Kinglong pun diklaimnya terbaik di dunia.

Apa saja fasilitas wisata di Plantera Fruit



Foto: Dokumen Pribadi

Paradise? Khusus untuk wisata, pihak Plantera membuka 124 hektare. Para pengunjung bisa berkeliling kebun buah dengan mobil wisata dengan harga Rp 25 ribu per orangnya.

Adapun fasilitas lainnya yang bisa dinikmati adalah berfoto di embung buatan di puncak kebun. Saat ini pihak plantera sedang mengem-

bangkan area outbond untuk anak-anak dan beberapa gazebo.

Untuk menikmati buah segar, para pengunjung bisa membelinya di toko yang area Agrowisata. Tertarik berkunjung? Puncak kunjungan biasanya saat panen buah antara bulan Desember hingga Maret. □ JAYANTO ARUS ADI